

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM

Nomor 1600/PSDKP.2/TU.140/X/2022

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Hal : Laporan Kinerja POA Periode Triwulan III 2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Tanggal : 20 Oktober 2022

Sehubungan dengan telah dilakukan pengukuran kinerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai salah satu upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Ditjen. PSDKP, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan III 2022 Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.



Pung Nugroho Saksono

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
TRIWULAN III 2022**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2022**

KATA PENGANTAR

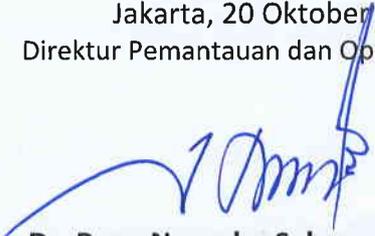
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan III 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sampai dengan Triwulan III 2022.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2022.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan III 2022 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : ⁽¹⁾ Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; ⁽²⁾ Operasional Pusat Pengendalian; ⁽³⁾ Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan ⁽⁴⁾ Operasional Armada dan Perawatan. Sampai dengan Triwulan III kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah berhasil melakukan beberapa kinerja strategis yang menjadi perhatian publik dalam hal operasi kapal pengawas, pengembangan teknologi, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pengawasan.

Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Triwulan III Tahun 2022. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 20 Oktober 2022
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat POA Triwulan III 2022

1. Koordinator Kelompok Operasional Pusat Pengendalian
2. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha
3. Husain, S.Kom

Kontributor Penyusunan LKj Lingkup Direktorat POA Tahun 2022

1. Ikrom Bungsu. S.Pi
2. Nova Roy Yohana, A.Md, S.Sos
3. Ridwan Nurzеха, S.Si
4. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
5. Bilmantasya Al Fattha, ST
6. Noval Reza Jaya, A.Md

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	11
Maksud dan Tujuan	11
Tantangan Dan Isu-Isu Strategis	12
Tugas dan Fungsi	14
Sistematika Penyajian	15

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	17
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024	17
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	19
Perjanjian Kinerja 2022	19
Pengukuran Capaian Kinerja	22

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III 2022	24
Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	26
Sasaran Kegiatan 1	26
Sasaran Kegiatan 2	30
Sasaran Kegiatan 3	34
Sasaran Kegiatan 4	49
Sasaran Kegiatan 5	53
Akuntabilitas Keuangan	63

BAB 4

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan III 2022.....	8
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022	20
Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022	22
Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan III 2022	24
Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan III 2022.....	27
Tabel 6. Daftar Provinsi Aktif Melaporkan Pembinaan Pokmaswas Periode Triwulan III 2022	28
Tabel 7. Data target dan realisasi keaktifan pokmaswas	29
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU-2 Periode Triwulan III 2022	31
Tabel 9. Rincian capaian per Indikator.....	31
Tabel 10. Indikasi Kapal Perikanan.....	32
Tabel 11. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi.....	33
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-3 periode Triwulan III 2022.....	35
Tabel 13. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode IX-B 2022	36
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Triwulan III 2022	46
Tabel 15. Hasil operasi PSDKP oleh Kapal Pengawas periode Triwulan III 2022	47
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan III 2022	49
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan III 2022	50
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan III 2022	52
Tabel 19. Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	52
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan III 2022	54
Tabel 21. Perbandingan Hasil IKM	55
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan III 2022	55
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan III 2022.....	56
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan III 2022	57
Tabel 25. Target dan realisasi IKU-12 periode Triwulan III 2022.....	58
Tabel 26. Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan III 2022.....	58
Tabel 27. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan III 2022.....	59
Tabel 28. Target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan III 2022.....	60
Tabel 29. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan III 2022.....	60
Tabel 30. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan III 2022.....	61
Tabel 31. Tabel Capaian Nilai IKU MP Ditjen PSDKP Triwulan III 2022.....	62
Tabel 32. Target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan III 2022.....	62
Tabel 33. Tabel Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil	63
Tabel 34. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 30 September 2022.....	64

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.....	14
Gambar 2. Dokumentasi Pengadaan Kapal Pengawas Multi Years Contract (MYC) T.A 2022-2023.	50
Gambar 3. Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Triwulan III 2022	65
Gambar 4. Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Triwulan III 2022	66

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III 2022. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022 Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja (IK) dengan target pencapaian IKU/IK periode Triwulan III 2022 sebanyak 9 IKU/IK telah memenuhi target dan 9 IKU/IK yang belum dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode berikutnya. Capaian kinerja Direktorat POA untuk Triwulan III 2022 mencapai 111,42% mengalami penurunan dari capaian triwulan tahun III 2021 sebesar 117,05%. Hal ini dikarenakan perubahan target capaian Indikator pada triwulan III 2022 yang sebelumnya target diakhir tahun menjadi target tiap triwulanan.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA sampai dengan Triwulan III 2022 telah melaksanakan 10 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan yang tertuang dalam DIPA Ditjen PSDKP tahun 2022. Pagu Direktorat POA yang semula sebesar Rp316.080.010.000 (tiga ratus enam belas miliar delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan penyesuaian anggaran anggaran Satker Dit. POA menjadi Rp332.477.900.000 (tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan III 2022 sebesar **Rp 229,829,227,480.-**, atau sekitar **69,13%** dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dari periode Triwulan III 2021 (**Rp 144,409,428,055**), kinerja penyerapan anggaran tersebut sebagai bentuk perbaikan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan percepatan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan lebih awal di Tahun 2022.

Direktorat POA telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan III 2022 berdasarkan prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU dan IK Direktorat POA periode Triwulan III 2022 menurut tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan III 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	40	82,35	205,88
2	Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	60	66,67	111,12
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	97,23	105,68
		4	Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,5	85,14	97,30
		5	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	90	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	-	-	-
		7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	-	-	-
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	8	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80	92,03	115,04
		9	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	-	-	-
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	93,14	120,96
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA (Nilai)	-	-	-
		13	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Inovasi)	-	-	-
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	98,15	114,13
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	100
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA						111,42%

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan III 2022

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA yang menginformasikan capaian kinerja selama periode Triwulan III 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA Triwulan III 2022 yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2020-2024

C.1. TANTANGAN PENGAWASAN SDKP

Tantangan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan dilaut saat ini semakin komplek dan beraneka ragam jenisnya serta datangnya tidak dapat diprediksi, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/63/111 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2008, ada 5 (lima) ancaman keamanan di laut dan salah satunya yaitu kegiatan IUU fishing. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dari kegiatan IUUF, dibuktikan dengan jumlah kapal IUUF yang ditangkap oleh kapal pengawas KKP selama kurun waktu tahun 2015-2020 yaitu sebanyak 707 kapal terdiri dari kapal kapal ikan berbendera asing maupun berbendera Indonesia. IUU fishing merupakan kegiatan yang tersembunyi, multidimensi serta sulit untuk diprediksi, kegiatan penangkapan ikan bersifat lintas negara sehingga sulit untuk mengidentifikasi aktor yang membiayai maupun pemiliknya.

Semakin kompleknya ancaman pelanggaran di laut dibidang kelautan dan perikanan tentunya memerlukan perubahan dalam pengawasan SDKP dengan mengandalkan teknologi informasi agar pengawasan lebih efektif dan efisien. Tuntutan penggunaan teknologi dalam pengawasan SDKP tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah sepatutnya kita menggunakan perkembangan teknologi komputasi digital, internet, cloud computing, artificial intelligent (AI), big data serta Internet of Thing (IoT).

Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern. Modernisasi juga diperlukan untuk prasarana pengawasan dengan tuntutan pengawasan SDKP di UPT Pengawasan yang semakin kompleks maka keberadaan prasarana pengawasan menjadi kunci keberhasilan.

Kementerian kelautan dan Perikanan mulai tahun 2022 ini menetapkan kebijakan penangkapan ikan terukur, Kebijakan **penangkapan ikan terukur** merupakan reformasi pengelolaan perikanan berbasis output control (kuota per kapal), dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan komersial (diantaranya diklat, litbang, kesenangan dan wisata), serta kuota untuk industri, salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan upaya pengawasan di laut (while fishing) untuk memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, kondisi tersebut menuntut instansi yang memiliki kapal pengawas dilaut untuk bersinergi baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat operasional lapangan.

C.2. ISU-ISU STRATEGIS

ILLEGAL FISHING MASIH MARAK

Situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik *illegal fishing*. Hal ini terbukti dengan masih tertangkapnya kapal-kapal pelaku *illegal fishing* oleh

Kapal Pengawas Perikanan. Tercatat sebanyak 14 Kapal ikan asing tertangkap oleh Kapal Pengawas dan sebanyak 69 kapal ikan Indonesia tertangkap oleh Kapal Pengawas sampai dengan bulan September 2022.

Eskalasi ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara juga terus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Indonesia untuk tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan *illegal fishing*.

PERAN POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran POKMASWAS sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan / aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-prinsip sumber daya lestari, karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

PENGUATAN ARMADA PENGAWASAN

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal pengawas. Berdasarkan penandatanganan *Exchange of Notes* (ENs) tanggal 14 Februari 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan hibah dari Pemerintah Jepang berupa 2 unit Kapal Eks. Patroli Badan Perikanan Jepang yaitu “Hakurei Maru” dan “Shirahagi Maru”. Kedua kapal tersebut memiliki panjang 63meter yang selanjutnya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP sebagai kapal pengawas kelautan dan perikanan.

Sebelum kedua kapal diserahkan ke KKP di Jakarta, Pemerintah Jepang melakukan perbaikan kapal di Jepang dengan alokasi anggaran JPY 2,2 Miliar. Saat ini kedua kapal tersebut sedang dalam proses perbaikan di Galangan kapal Jepang dan dijadwalkan Sailing dari Jepang untuk diserahkan di Jakarta pada Tahun 2023.

Sebanyak 2 unit Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

SINERGITAS OPERASI BERSAMA

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu memiliki beragam permasalahan seperti menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut

2. Fungsi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Direktorat.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2022 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020-2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2022 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan III 2022

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat POA, Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Direktorat POA tahun 2022.

A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
- b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017, Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran, yaitu:

- a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- b. Operasional Pusat Pengendalian;
- c. Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan
- d. Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan dan operasi armada didukung oleh beberapa rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional;
2. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat;
3. Speedboat Pengawas;
4. Kapal Pengawas;
5. Operasi Pesawat Patroli;
6. Operasi Kapal Pengawas;
7. Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau;
8. Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau;
9. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan;
10. NSPK Pemantauan dan Operasi Armada;
11. Layanan Perkantoran.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT POA 2022

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara Pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja tahun 2022 terdiri atas 5 Sasaran Kegiatan selama periode tahun dimana pengukurannya melalui instrument realisasi Indikator Kinerja, berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif (%)	90	%
2	Terselenggaranya sistem pemantauan kapal perikanan	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80	Indeks
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	Indeks
		4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,5	Indeks
		5	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	Indeks
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	60	%
		7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100	%
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	8	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan (indeks)	80	Indeks
		9	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	%
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	77	Indeks

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	%
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (nilai)	90	Nilai
		13	Nilai implementasi program budaya Kerja (nilai)	21	Nilai
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (inovasi)	1	Inovasi
		15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	75	%
		16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	75	%
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	%
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	%

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan tersebut, beberapa output kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat POA tahun 2022 setelah penyesuaian dikarenakan Automatic Adjustment ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	100.000.000
2	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2.750.000.000
3	Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	750.000.000
4	Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	250.000.000
5	Operasi Kapal Pengawas	114.570.105.000
6	Operasi Pesawat Patroli	61.250.000.000
7	Kapal Pengawas	87.812.846.000
8	Speedboat Pengawas	8.978.070.000
9	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	51.016.879.000
10	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	5.000.000.000
Anggaran Direktorat POA 2022		332.477.900.000

E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis teknologi informasi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan III 2022

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III 2022

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Triwulan III 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa **nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 111,42%** dengan indikator NPSS berwarna HIJAU. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan III 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	TARGET TW III	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	90	40	82,35	205,88
2	Terselenggaranya sistem pemantauan kapal perikanan	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80	60	66,67	111,12
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	92	97,23	105,68
		4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,5	87,5	85,14	97,30
		5	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	90	90	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	60	-	-	-
		7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan	100	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW III	CAPAIAN	%	
		prasarana pengawasan SDKP (%)					
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	8	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan (indeks)	80	80	92,03	115,04%
		9	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-	-
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	77	-	-	-
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	77	93,14	120,96
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (nilai)	90	-	-	-
		13	Nilai implementasi program budaya Kerja (nilai)	21	-	-	-
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayan publik (inovasi)	1	-	-	-
		15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup	75	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW III	CAPAIAN	%
		Direktorat POA (%)				
	16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	75	-	-	-
	17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	86	98,15	114,13
	18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	70	100

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan Provinsi dalam melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berada di bawah kendali pembinaannya. Salah satu *tools* yang digunakan adalah Laporan Pembinaan Pokmaswas dari DKP Provinsi yang dilengkapi dengan "form keaktifan POKMASWAS" yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke setiap Provinsi terkait.

DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada "Form Keaktifan POKMASWAS". Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan menyesuaikan rencana aksi masing-masing Provinsi.

Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas	-	-	40	82,35	205,88	90	82,35	91,50

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada triwulan III 2022 ditargetkan sebesar 40 persen dengan capaian sebesar 82,35 persen dengan persentase capaian sebesar 205,88 persen. Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja organisasi yang ditetapkan pada triwulan III 2022 dapat dicapai dengan maksimal. Maksimalnya capaian tersebut karena Direktorat POA senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan secara rutin pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh masing-masing Provinsi. Pendampingan yang dilakukan terhadap masing-masing Provinsi berupa koordinasi via online berupa komunikasi via Whatsapp, telepon komunikasi, dan zoom, sementara via offline berupa kunjungan kedinasan ke lokasi pembinaan Pokmaswas atau kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dimaksud.

Sehubungan dengan perbedaan penentuan target per triwulan indikator kinerja dimaksud pada tahun 2021 dan 2022, maka untuk capaian pada periode triwulan III 2022, belum dapat dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021. Perbandingan capaian baru dapat dilakukan pada periode triwulan IV 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 90 persen, realisasi ini baru mencapai 82,35 persen, oleh karena itu masih perlu upaya untuk dapat mencapainya sampai dengan akhir tahun 2024.

Untuk memperoleh hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

RUMUS		
X	a	x 100
	b	
Keterangan:		
x	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan POKMASWAS	
a	Jumlah provinsi yang melaporkan hasil pembinaan	
b	Jumlah DKP Provinsi yang wajib melaporkan	

PERHITUNGAN			
X	=	a 28	x 100
		b 34	
			82,35 %
Keterangan:			
x	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan POKMASWAS		
a	Terdapat 28 provinsi yang melaporkan hasil pembinaan		
b	34 DKP Provinsi yang wajib melaporkan		

Hingga periode triwulan III 2022 terdapat **28 Provinsi** yang telah aktif melaporkan kegiatan pembinaan POKMASWAS nya antara lain:

Tabel 6. Daftar Provinsi Aktif Melaporkan Pembinaan Pokmaswas Periode Triwulan III 2022

NO	PROVINSI	KEAKTIFAN
1	Aceh	√
2	Sumatera Utara	-
3	Sumatera Barat	-
4	Sumatera Selatan	√
5	Jambi	-
6	Bengkulu	√
7	Lampung	√
8	Riau	√
9	Kepulauan Riau	√
10	Kepulauan Bangka Belitung	√
11	Banten	√
12	DKI Jakarta	√
13	Jawa Barat	√
14	Jawa Tengah	√

NO	PROVINSI	KEAKTIFAN
15	Jawa Timur	-
16	DI Yogyakarta	√
17	Bali	√
18	Nusa Tenggara Barat	√
19	Nusa Tenggara Timur	√
20	Kalimantan Utara	√
21	Kalimantan Tengah	√
22	Kalimantan Selatan	√
23	Kalimantan Timur	√
24	Kalimantan Barat	√
25	Sulawesi Utara	√
26	Sulawesi Barat	-
27	Sulawesi Tengah	-
28	Sulawesi Tenggara	√
29	Sulawesi Selatan	√
30	Gorontalo	√
31	Maluku	√
32	Maluku Utara	√
33	Papua	√
34	Papua Barat	√
Total		28

Tabel 7. Data target dan realisasi keaktifan pokmaswas

NO	SATKER	Target	Realisasi Kelompok
A. DKP Provinsi			
1	Aceh	15	29
2	Sumatera Utara	15	8
3	Sumatera Barat	59	26
4	Sumatera Selatan	38	30
5	Jambi	35	31
6	Bengkulu	24	32
7	Lampung	41	65
8	Riau	39	40
9	Kepulauan Riau	48	27
10	Kepulauan Bangka Belitung	33	35
11	Banten	14	10
12	DKI Jakarta	10	13
13	Jawa Barat	60	66
14	Jawa Tengah	35	8
15	Jawa Timur	49	96
16	DI Yogyakarta	38	20

NO	SATKER	Target	Realisasi Kelompok
17	Bali	37	37
18	Nusa Tenggara Barat	48	42
19	Nusa Tenggara Timur	24	14
20	Kalimantan Utara	16	14
21	Kalimantan Tengah	24	17
22	Kalimantan Selatan	88	90
23	Kalimantan Timur	14	14
24	Kalimantan Barat	34	19
25	Sulawesi Utara	33	29
26	Sulawesi Barat	17	12
27	Sulawesi Tengah	17	13
28	Sulawesi Tenggara	18	30
29	Sulawesi Selatan	44	48
30	Gorontalo	14	15
31	Maluku	12	10
32	Maluku Utara	31	26
33	Papua	6	30
34	Papua Barat	15	5
B. UPT PSDKP			
1	Lampulo	3	4
2	Batam	2	1
3	Jakarta	14	22
4	Bitung	4	2
5	Benoa	6	0
6	Belawan	3	0
7	Pontianak	4	2
8	Cilacap	11	14
9	Tarakan	1	2
10	Kupang	3	3
11	Ambon	3	2
12	Biak	1	0
Total		1100	1053

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp250.000.000,- dan sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp210.378.882,- atau 84,15% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan" diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks).

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisa Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU-2 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021			TW III 2022			RENSTRA 2024	
	T	R	%	T	R	%	T	R
Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	60	75%	125%	60	66,67	111,12	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan III Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2022 sebesar 66,67 dengan persentase capaian sebesar 111,12%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III 2021, terdapat penurunan sebesar 8,88% dari yang sebelumnya sebesar 75%. Penurunan capaian ini disebabkan oleh pemantauan terhadap kapal pengangkut ikan hidup baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dikarenakan sebelumnya masih dalam proses peralihan perizinan kapal pengangkut ikan hidup yang sebelumnya berada di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjadi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Namun mulai pada Triwulan III, seluruh indikator sudah dapat terpenuhi. Realisasi untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra karena belum masuk di dalamnya sebagai target.

Rincian capaian per indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian capaian per Indikator

No	Indikator	Bulan			Bobot	TW III
		7	8	9		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	40	30
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	20	15
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	20	8,33
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	20	13,33
Indeks						66,67

Indikator kinerja diatas memiliki rincian sebagai berikut:

1. Indikasi Pelanggaran

Selain dari pemantauan tingkat keaktifan kapal dalam mengaktifkan transponder, kapal juga dipantau pergerakannya agar tetap patuh terhadap peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Salah satunya adalah dengan menerbitkan indikasi pelanggaran melalui pemantauan SPKP. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Selama Triwulan III 2022, diterbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 760 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 10. Indikasi Kapal Perikanan

No	Indikasi Pelanggaran	Bulan			Total
		Jul	Ags	Sep	
1	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	206	211	291	708
2	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	19	17	4	40
3	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	8	2	2	12
	TOTAL	233	230	297	760

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III 2021, tidak ada perubahan capaian karena indikator terpenuhi pada setiap bulannya baik di tahun 2021 maupun 2022.

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada periode triwulan III 2022 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 13 kawasan konservasi yang terpantau terdapat kapal yang melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi

No.	Kawasan Konservasi	Juli	Agustus	September
1	KKP BURUWAY, ARGUNI, TELUK ETNA, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	9	5	5
2	KKP GUGUSAN PULAU-PULAU MOMPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	0
3	KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT KABUPATEN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT	6	1	9
4	KKP SAWO-LAHEWA DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	5	6	5
5	KKP SELAT BUNGA LAUT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DI PROVINSI SUMATERA BARAT	3	3	1
6	KKP3K KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3	1	4
7	KKP3K PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU	0	0	1
8	KAWASAN KONSERVASI SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA	1	2	0
9	SAP KEPULAUAN RAJA AMPAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	1	0	0
10	SAP KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	0	1	2
11	SAP KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU	65	27	70
12	TNP LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	4	1	1
13	TWP KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	62	79	70
14	TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) LAUT BANDA DI PROVINSI MALUKU	0	1	0

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III 2021, tidak ada perubahan capaian karena indikator terpenuhi pada setiap bulannya baik di tahun 2021 maupun 2022.

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut

ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian sampai dengan bulan September 2022 telah melakukan pemantauan terhadap 24 kapal pengangkut ikan hidup.

4. Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance
Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Triwulan III 2022 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap bulan.

Pemenuhan analisis data pada periode Triwulan III 2022 meliputi: Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan Data untuk Ops Kapal Pengawas / *Airborne Surveillance*.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp5.000.000.000,- dan sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp3.234.612.574,- atau 64,69% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif" diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks), (2) Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks), (3) Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP (indeks).

3

INDEKS KINERJA OPERASI PESAWAT PATROLI

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil,

- dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
 9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-3 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Pesawat Patroli	-	-	92	97,23	105,68	-	-	-

Indikator baru ini merupakan hasil penyempurnaan dari IKU sebelumnya yaitu “Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Pesawat Patroli”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka belum dapat dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021. Hingga Triwulan III 2022 target kinerja IKU Indeks Kinerja Pesawat Patroli telah tercapai sebesar 97,23 persen dengan persentase capaian sebesar 105,68 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024.

Selama periode operasi Triwulan III 2022 telah dilaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 133 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain: "MPA ATR 42-300 PK-YRE" dan "Hawker 900XP".

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas dilaut antara lain:

1. Periode I: KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. Orca 04, KP. Hiu Macan Tutul 01, KP. Hiu Macan Tutul 02 dan KP. Paus 01.
2. Periode I-A: Operasi Mandiri.
3. Periode I-B: Operasi Mandiri.
4. Periode I-C: Operasi Mandiri.
5. Periode II: Operasi Mandiri.
6. Periode II-A: Operasi Mandiri.
7. Periode III Lanjutan: KP.Orca 01 dan KP. Orca 04.
8. Periode III-A: Operasi Mandiri.
9. Periode IIIB: Operasi Mandiri.
10. Periode III-C: Operasi Mandiri.
11. Periode III-D: Operasi Mandiri.
12. Periode III-D (RTE): Operasi Mandiri.
13. Periode III-E: Operasi Mandiri.

14. Periode IV: KP. Orca 03, KP. Orca 01, KP. Orca 02, KP. Orca 04, KP. Paus 01, KP. HMT 01.
15. Periode IV-A: Operasi Mandiri.
16. Periode V: KP. Hiu 15.
17. Periode VI: KP. Hiu 15.
18. Periode VI-A: Operasi Mandiri.
19. Periode VII: Operasi Mandiri.
20. Periode VII-A: Operasi Mandiri.
21. Periode VIII: Operasi Mandiri.
22. Periode IX: KP. Hiu 15.
23. Periode IX-A: Operasi Mandiri.
24. Periode IX-B: KP. Orca 02, KN. Pulau Dana 323, ABF Cape Size Vessel.

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 13. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode IX-B 2022

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	6 – 25 Januari 2022	15	711, 571, 712, 713, 715, 573	144.428,8	KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. Orca 04, KP. Hiu Macan Tutul 01, KP. Hiu Macan Tutul 02, KP. Paus 01	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan tanggal 11 Januari 2022 terhadap 1 Kapal Rawai >30 GT KM. Soyo Lestari Rawai Dasar dengan status transmitter aktif; • Validasi ketaatan tanggal 12 Januari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Tetap Jaya 01 dengan status transmitter aktif; • Validasi ketaatan tanggal 18 Januari 2022 terhadap 2 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Bintang Rejeki – V dan KM. Eka Cakra – 2, 4 Kapal Bouke Ami > 30 GT KM. Yama Toba – 05,

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<p>KM. Harapan Baru, KM. Dian Jaya – I, KM. Mandiri – 08 dengan status transmitter aktif;</p> <ul style="list-style-type: none"> Validasi ketaatan tanggal 22 Januari 2022 terhadap 12 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Bintang Timur, KM. Satria Perkasa, KM. Setia Rejeki, KM. Setia Jaya Makmur, KM. Setia Bhakti F, KM. Setia Mulya Jaya, KM. Setia Mulya Makmur, KM. Baruna Nusantara – 2, KM. Harapan Jaya Makmur, KM. Indah Jaya – I, KM. Indah Kail, KM. Tri Mina Prima dengan status transmitter aktif; Validasi ketaatan tanggal 23 Januari 2022 terhadap 1 Kapal Cumi >30 GT KM. Merauke Jaya, 1 Kapal Purse Seine > 30 GT KM. Khas dengan status transmitter aktif. Validasi ketaatan tanggal 25 Januari 2022 terhadap 2 Kapal Bouke Ami >30 GT KM. Sari Jati Mulya

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						dan KM. Tan Jaya -7, 1 Kapal Penampung KM. Bandar Angkut Jaya-1 dengan status transmitter aktif.
I-A	7 & 16 Januari 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-
I-B	27 – 30 Januari 2022	4	711	3054,9	OPERASI MANDIRI	Tindak lanjut hasil pemantauan melalui matra udara adalah validasi kepatuhan 1 (satu) unit Kapal Cast Net dengan nama lambung KM. Harapan Sentosa III, 1 (satu) unit Kapal Purse Seine dengan nama lambung KM. Surya – 6, 1 (satu) unit Kapal Rawai Dasar dengan nama lambung KM. Sumber Rejeki Berkembang – 2, dan 1 (satu) unit Kapal Bouke Ami dengan nama lambung KM. Mekar Alam Jaya – 8 dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.
I-C	26 - 30 Januari 2022	2	711, 712	-	OPERASI MANDIRI	-

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
II	31 Januari & 5 Februari 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-
II-A	9 – 24 Februari 2022	12	711, 572, 716, 713, 573	63.747,2	OPERASI MANDIRI	Validasi ketaatan tanggal 12 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Filadelfia - 02 dengan status transmitter aktif; Validasi ketaatan tanggal 13 Februari 2022 terhadap 4 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Perintis Samudra, KM. Tiga Saudara, KM. Sumber Jaya, KM. Chelsea Ratna Wijaya, dengan status transmitter aktif. ; Validasi ketaatan tanggal 21 Februari 2022 terhadap 3 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Halindo Utama, KM. Kasih Setia – XVI.A, Kasih Setia – IX dengan status transmitter aktif. ; Validasi ketaatan tanggal 22 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Bouke Ami >30 GT KM. Surya Terbit 7 dengan status transmitter aktif;
III	25 Februari - 19 Maret 2022	15	571, 572, 573, 711,	154.298	KP ORCA 01, KP ORCA 04	1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP):

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
			712, 715, 716			<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Jasa Mina Srikawit dengan status transmitter aktif; • Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap 2 Kapal Pengangkut >30 GT KM. Sakti Bahagia dan KM. Karya Manggala Sakti dengan status transmitter aktif.; • Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Marcel Jaya - 28 dengan status transmitter aktif • Validasi ketaatan tanggal 16 Maret 2022 terhadap 4 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Garuda Jaya - I, KM. Cendrawasih Jaya 198, KM. Rajawali Jaya Baru dan KM. Bintang Surya 7 dengan status transmitter aktif; <p>2. Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat;</p> <p>3. Penerusan informasi keberadaan KIA asal</p>

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						Malaysia dengan alat tangkap Trawl ke Kapal Pengawas;
IIIA	28 Februari - 1 Maret 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-
IIIB	6 - 11 Maret 2022 18 - 20 Maret 2022	6	715, 573	13.104	OPERASI MANDIRI	-
IIIC	7 - 13 Maret 2022	6	715, 712	-	OPERASI MANDIRI	-
IIID	11 - 20 Maret 2022	3	712	-	OPERASI MANDIRI	-
IIID (RTB)	20 Maret 2022	0	-	-	OPERASI MANDIRI	-
IIIE	15 Maret 2022	1	-	-	OPERASI MANDIRI	-
IV	21 - 27 Maret 2022 19 - 24 April 2022	11	713, 718, 712, 711	133.149	KP. ORCA 03, KP. ORCA 01, KP. ORCA 02, KP. ORCA 04, KP. PAUS 01, KP. HIU MACAN TUTUL 01	1. Validasi kepatuhan 2 unit Kapal Cumi (Bouke Ami) dan 1 unit Kapal Cast Net (Jala Jatuh Berkapal) dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif. 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Anambas; 3. Penerusan informasi keberadaan KIA asal, Thailand, Vietnam, China dan Malaysia dengan alat

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<p>tangkap Trawl ke Kapal Pengawas;</p> <p>4. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya;</p> <p>5. Pendaataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 712, 713, dan 718.</p> <p>6. Telah Dilaksanakan Dukungan Misi SAR di Sekitar Pulau Tior</p>
IVA	23 - 24 Maret 2022	2	713	-	-	-
V	19 - 31 Mei 2022	12	711, 716, 715, 717, 718, 714, 713, 573	173.405	KP. HIU 15	<p>1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);</p> <p>2. Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat, Waigeo, Perairan laut Aru bagian Tenggara, Perairan laut sawu, dan Perairan Kepulauan Kapoposang;</p> <p>3. Penerusan informasi keberadaan KIA Filipina dengan alat tangkap Purse Seine dan Pumpboat ke Kapal Pengawas HIU 15 dan Stasiun PSDKP Tahuna;</p>

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
VI	7 - 13 Juni 2022	5	712, 713, 714, 716	55.270,4	KP. HIU 15	<p>1. Terpantau 8 KIA Light Boat, 7 KIA Purse Seine, 3 KIA Penampung, dan 23 FAD (Ponton) asal Filipina di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;</p> <p>2. Hasil Pemantauan tersebut telah di teruskan kepada Kapal Pengawas Hiu 15 dan Stasiun PSDKP Tahuna.</p> <p>3. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).</p>
VI-A	27 Juni - 2 Juli 2022	5	711	92.644,4	OPERASI MANDIRI	KIA yang terpantau di perbatasan RI – Vietnam masih berada di luar batas ZEEI, selanjutnya dilakukan proses pemantauan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan Pangkalan PSDKP Batam.
VII	13 - 24 Juli 2022	9	571, 714, 715, 718, 713, 573	108.681,6	OPERASI MANDIRI	1. Validasi kepatuhan 8 unit Kapal Perikanan dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif, 1 unit Kapal Perikanan dengan status transmitter aktif (SIPI Expired), dan 1 unit Kapal Perikanan

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						dengan status transmitter tidak aktif; 2. Pemantauan Kawasan TWP Laut Sawu, TWP Laut Banda, Gili Ayer & Gili Trawangan.
VII-A	25 - 29 Juli 2022	2	711	28.390,4	OPERASI MANDIRI	1. Telah dilaksanakannya kegiatan dukungan pimpinan secara lancar; 2. Pendaataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711.
VIII	12 Agustus 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	Telah dilaksanakannya kegiatan dukungan pimpinan secara lancar;
IX	11 - 16 September 2022	6	716, 715, 718	29.712	KP. HIU 15	1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP): <ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan 1 Kapal Rawai Dasar (KM. Nok Lutfi) dan 2 Kapal Gill Net (KM. Kartika Sari 2 dan KM. Putra Aukil 2) tanggal 11 September 2022 dengan status aktif Validasi kepatuhan 1 Kapal Purse Seine (KM. Sinar Laut) tanggal 16 September 2022 dengan status aktif

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						2. Pemantauan aktifitas Kapal Ikan Asing di WPPNRI 716 dan tidak ditemukan adanya aktifitas KIA maupun ABPI asing;
IX-A	13 - 19 September 2022	4	718, 714	-	OPERASI MANDIRI	Telah dilaksanakannya kegiatan dukungan pimpinan secara lancar;
IX-B	22 - 30 September 2022	8	711, 713, 573	70.953,6	KP. ORCA 02, KN. PULAU DANA 323, ABF Cape Size Vessel	1. Penerusan informasi keberadaan Kapal Perang China, Jepang, dan Kapal Induk; 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Anambas dan Laut Sawu; 3. Telah Dilaksanakan Dukungan Patroli Bersama Gannet AUSINDO - 6 2022.
Total Hari Operasi		133	Total Coverage Area (NM²)	1.070.839,3		

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp61.250.000.000,- dan sampai dengan Triwulan III 2022 telah terealisasi sebesar Rp44.651.335.609,- atau 72,90% dari total pagu.

4

INDEKS KINERJA OPERASI KAPAL PENGAWAS

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan

mengukur kemajuan terhadap operasional Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 9 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	87,5	85,14	97,39	89	85,14	95,66

Indikator “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pencapaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada Triwulan III sebesar 85,14 dengan persentase capaian sebesar 97,39 persen. Dengan demikian Indikator ini tidak tercapai disebabkan tidak terpenuhinya 3 variabel dari total 9 variabel yang seharusnya. Adapun variable yang tidak tercapai yaitu: 1) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa dengan target bobot 20% hanya tercapai 12,67%, 2) Persentase Capaian Hari Operasi dengan target bobot 15% hanya tercapai 13,74% dan 3) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing* dengan target bobot 10% hanya tercapai 3,74%.

Variabel perhitungan yang tidak tercapai sebagaimana dijelaskan di atas, dipengaruhi secara langsung oleh ketersediaan logistik cair (Bahan Bakar Minyak), dimana anggaran BBM Kapal Pengawas yang tersedia pada DIPA Direktorat POA tidak cukup untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu 89 persen capaian tersebut baru mencapai 95,66 persen.

Ketidaktercapaian nilai Indeks Kinerja pada periode ini disebabkan perencanaan di Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 11.500 per liternya namun harga BBM terus meningkat di bulan Januari 2022 berdasarkan Surat Pertamina Patra Niaga Nomor 020/PNC220000/2022-S3 tanggal 5 Januari 2022 perihal Harga Jual Keekonomian BBM Pertamina Periode 01-14 Januari 2022 harga BBM sebesar Rp 14.800 per liter (belum termasuk pajak) dan hingga saat ini harga BBM di harga Rp 23.700 per liter (belum termasuk pajak) berdasarkan Surat Pertamina Patra Niaga nomor 679/PNC220000/2022-S3 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Harga Jual Keekonomian BBM Pertamina Periode 15-31 Oktober 2022.

Selama periode triwulan III 2022 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas dengan jumlah hari operasi mandiri 30 Kapal Pengawas selama Triwulan III tahun 2022 sebanyak 1720 hari operasi dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanyak 57 hari operasi.

Adapun hasil operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Kapal Pengawas ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil operasi PSDKP oleh Kapal Pengawas periode Triwulan III 2022

No.	Periode Operasi Kapal Pengawas	Hari Ops	Jam Ops	Riksa			Tangkap		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	Operasi Periode I (1 s.d 31 Januari 2022)	338	1642,9	270	4	274	18	4	22
2	Operasi Periode II (1 s.d 28 Februari 2022)	230	2544	288	2	290	5	0	5
3	Operasi Periode III (1 s.d 31 Maret 2022)	289	3693,2	564	2	566	27	2	29
4	Operasi Periode IV (1 s.d 30 April 2022)	301	4835	964	0	964	14	0	14
5	Operasi Periode V (1 s.d 31 Mei 2022)	239	2526,84	291	3	294	1	0	1
6	Operasi Periode VI (1 s.d 30 Juni 2022)	71	1048,44	76	2	78	0	2	2
7	Operasi Periode VII (1 s.d 31 Juli 2022)	81	825,16	105	4	109	2	2	4
8	Operasi Periode VIII (1 s.d 31 Agustus 2022)	108	723,38	48	3	51	2	1	3

No.	Periode Operasi Kapal Pengawas	Hari Ops	Jam Ops	Riksa			Tangkap		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
9	Operasi Periode IX (1 s.d 30 September 2022)	63	536,05	80	3	83	0	3	3
Jumlah		1720	18374,97	2686	23	2709	69	14	83

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp114.570.105.000,- dan sampai dengan Triwulan III 2022 telah terealisasi sebesar Rp96.918.068.830,- atau 84,59% dari total pagu.

5

INDEKS PEMENUHAN LOGISTIK ARMADA PENGAWASAN SDKP

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel.

Logistik kapal terdiri dari:

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM), dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari:

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%).

Selama periode triwulan III 2022 untuk mendukung capaian IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Logistik KP Berupa BBM KP, Pelumas, Air Bersih, Ongkos Angkut, BBM Sea Rider / Rubber Boat;
2. Dukungan Logistik Berupa ATK, Bahan Komputer, Penjilidan Laporan, Jurnal Deck & Mesin, Buku PASUT, Biaya Pengiriman Laporan, Biaya Sewa DARDER KP. Akar Bahar, Komaliwan, dan Perdin Kegiatan Logistik;
3. Pemenuhan Logistik Awak Berupa Honor TKP, Jamuan Tamu, BPDT, Delegasi, Jaga Sandar, Perdin Konsultasi AKP Pusat, Natura (Bahan Makanan);

4. Pemenuhan Bahan Pemeliharaan Senpi, Perpanjangan Buku PAS Senpi, Pembaharuan Buku Pas SS1, Pembuatan Kartu Pengpin, Pembelian Munisi, Perdin Operasional Senpi dan Biaya Instruktur Bongkar Pasang senpi;
5. Perjalanan Dinas untuk Pembinaan dan Rotasi bagi Awak Kapal Pengawas;
6. Pengadaan Perlengkapan COVID 19, Biaya Tes Swab AKP, dan Fasilitas Isoman Untuk AKP;

Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	-	-	90	90	100	-	-	-

Indikator “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pencapaian IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP pada Triwulan III sebesar 90 dengan persentase capaian sebesar 100 persen. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dan (2) Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP.

6

PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2022 terdapat Pengadaan Speedboat Pengawas sebanyak 2 (dua) unit dan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan kelas II yang dilakukan *Multi Years Contract (MYC) Tahun anggaran 2022-2023*. Pengadaan Speeboat sudah selesai 100% pada bulan maret 2022 dan sudah dioperasikan untuk Patroli Pengawasan. Untuk Progres Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) hingga Minggu ke-26 (tanggal 23 s/d 29 September 2022) Kapal 1 (SA-041) sebesar 3,0787% dan Kapal 2 (SA-042) sebesar 3,0911%. Ditargetkan di tahun 2022 selesai

pengerjaan konstruksi kapal. Foto dokumentasi kegiatan konstruksi kapal sampai dengan Minggu ke-26 dapat dilihat gambar dibawah ini:



Gambar 2. Dokumentasi Pengadaan Kapal Pengawas Multi Years Contract (MYC) T.A 2022-2023.

Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Pengawasan SDKP								

Indikator “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP pada Triwulan III belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Indikator “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP pada Triwulan III belum ada realisasi. Dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

7

PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” IKU ini bertujuan untuk mengukur Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi pada tahun 2022.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP pada periode Triwulan III 2022 terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Perawatan Pencegahan (*Preventive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap resiko kerusakan dini (*preventive maintenance*) pada kapal. Perawatan rutin diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
2. Perawatan Prediktif (*Predictive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara memprediksi kerusakan yang akan timbul pada kapal pengawas, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk perawatan kapal pengawas yang bersifat periode. Perawatan prediktif diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
3. Perawatan Darurat (*Breakdown maintenance*) merupakan perawatan yang dilaksanakan dalam rangka menangani/memperbaiki kerusakan yang terjadi diatas kapal akibat kejadian yang tidak terduga (*unpredicted*), kegiatan perbaikan ini sangat penting untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lanjutan yang lebih fatal. Perbaikan darurat dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga atau dengan cara swakelola sesuai batas kemampuan teknis yang dimiliki Awak Kapal Pengawas (AKP).

Rincian capaian IKU 7 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP pada Triwulan III belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Selama periode triwulan III untuk mendukung capaian IKU Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP, telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan 8 unit kapal pengawas di satker Pusat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 19. Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan			Keterangan
		Perawatan pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat	
1	KP. ORCA 01	Perawatan rutin bulanan	-	-	Selesai
2	KP. ORCA 02	Perawatan rutin bulanan	-	Penggantian Body Axial Marine Fan Ruang Bow Truster , Pemasangan Housing Blower Buritan, Pembersihan Tritip Lambung Bawah Air , Penggantian Electro Motor Blower Haluan, penggantian mounting karet <i>auxilliary engine</i> ,	Selesai
3	KP. ORCA 03	Perawatan rutin bulanan	<i>Top Overhaul main engine</i>	-	Selesai
4	KP. ORCA 04	Perawatan rutin bulanan	<i>Top Overhaul main engine</i>	Penggantian Display Wind Speed Direction	<i>Top Overhaul main engine (on Progres)</i>
		Docking	-	-	Selesai

5	KP. HMT 01	Perawatan rutin bulanan	<i>Repowering auxiliary engine harbour</i>	penggantian komponen sistem DC elektrik <i>auxiliary engine</i> kiri, penggantian <i>screen filter</i> dan <i>solenoid fuel pump</i>	<i>Repowering auxiliary engine harbour (on Progres)</i>
6	KP. HMT 02	Perawatan rutin bulanan	-	-	Selesai
7	KP. PAUS 01	Perawatan rutin bulanan	-	-	Selesai
		Perbaikan ruang akomodasi	-	-	Selesai
8	KP. AKAR BAHAR	Perawatan rutin bulanan	-	Scaling Condenser dan Service AC	Selesai
		Docking	-	-	Selesai

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp 51.016.879.000,- dan sampai dengan Triwulan III 2022 telah terealisasi sebesar Rp 34.150.010.330,- atau 66,94% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 5

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan), (2) Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (3) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA, (4) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, (5) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA, (6) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, (7) Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik, (8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA, (9) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA, (10) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA, (11)) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.

8

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT),
Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan;
2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan,
Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.
3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan,
Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja pelayanan publik.

Rincian capaian IKU 8 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP	-	-	80	92,03	115,04	80	92,03	115.04

Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP” yang semula dilakukan pengukuran di akhir tahun sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama. Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP” periode Triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar 92,03 persen dari target sebesar 80 persen dengan persentase capaian melampaui target yaitu sebesar 115,04 persen. Peningkatan terjadi pada setiap produk layanan dengan peningkatan terbesar pada produk layanan Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan sebesar 2,11. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen realisasi ini telah mencapai 115.04 persen, dengan demikian target sesungguhnya telah tercapai, hanya saja perlu upaya mempertahankan capaian tersebut sampai akhir periode Renstra.

Rincian Perbandingan Hasil IKM Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 21. Perbandingan Hasil IKM

PRODUK LAYANAN	TRIWULAN III TAHUN 2021	TRIWULAN III TAHUN 2022
Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	91,44	93,05
Analisis Pergerakan Kapal Perikanan	87,99	88,99
Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan	91,05	93,16
Total	270,48	275,02
Rata-rata	90,16	91,73

Selama periode triwulan III 2022 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan Uji Lapang dan Pemasangan Transmitter (Bajomulyo, 2 Agustus 2022);
2. Pendampingan Uji Lapang dan Pemasangan Transmitter (Kluwut, 26 Agustus 2022);
3. Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2022 (Cirebon, 13 September 2022).

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp2.750.000.000,- dan sampai dengan Triwulan III 2022 telah terealisasi sebesar Rp1.862.002.916,- atau 67,71% dari total pagu.

9

PERSENTASE PENYELESAIAN RANCANGAN NSPK BIDANG PENGAWASAN SDKP LINGKUP DIREKTORAT POA

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III 2022 progress masih dalam tahap penyusunan draft dan proses pengesahan. Direncanakan pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menegakkan peraturan terhadap pelanggar yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 9 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pencapaian IKU Persentase Penyelesaian

Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA pada Triwulan III belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp100.000.000,- dan sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp.264.000,- atau 0,26% dari total pagu. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan IKU 9 ini terkena Automatic Adjustmen sehingga tidak ada penambahan pada realisasi anggaran tersebut.

10

INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT POA

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: ¹⁾

Kualifikasi; ²⁾ Kompetensi; ³⁾ Kinerja; dan ⁴⁾ Disiplin, dengan formula sebagai berikut:

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20 oj+Seminar)/3)
+ (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20 oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp)
+ (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20 oj+ Seminar)/3) + (NilaiSkp) + (Nilai Disiplin)

Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 77%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). Direktorat POA telah melaksanakan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP Triwulan III Tahun 2022 pada Bulan Juni 2022 di Manado dengan peserta sebanyak 35 orang pengguna Layanan SPKP.

Rincian capaian IKU 11 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA	-	-	77	93,14	120,96	80	93,14	116.42

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU "Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA" ditargetkan sebesar 77 persen. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2022 adalah sebesar 93,14 persen dari target sebesar 77 persen dengan persentase capaian melampaui target yaitu sebesar 120,96 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen, realisasi telah ini telah melampaui target yaitu mencapai 116.42 persen. Namun demikian masih perlu dilakukan upaya mempertahankan capaian agar dapat konsisten hingga periode akhir Renstra.

Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Nilai rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi.

Rekonsiliasi Kinerja merupakan bentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkalit pelaporan kinerja.

Rincian capaian IKU 12 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 25. Target dan realisasi IKU-12 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pencapaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA pada Triwulan III belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

13

NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2022, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase
- Target nilai Satker Pusat minimal 23 per triwulan
- Target nilai Satker UPT minimal 20,5 per triwulan

Rincian capaian IKU 13 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 26. Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” periode Triwulan III 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Rincian capaian IKU 14 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 27. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Unit Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” ditargetkan sebesar 1 Inovasi. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Rincian capaian IKU 15 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 28. Target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lngkup Direktorat POA” merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 75%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

16

TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DIREKTORAT POA

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Rincian capaian IKU 16 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 29. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021		TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA” yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan III 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 75%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

17

PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Komponen penilaian pengukuran Manajemen Pengetahuan KKP antara lain: Keikutsertaan, Dokumen Kinerja, dan Keaktifan.

- a. Keikutsertaan
Minimal unit eselon I sampai dengan eselon IV
- b. Dokumen
Beberapa dokumen yang harus diupload sebagai dokumen pengetahuan antara lain : Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja dan Interim, Rencana Kerja RB, Rencana Aksi Kinerja
- c. Keaktifan
Keaktifan berupa senantiasa melakukan upload informasi/pengetahuan. Pimpinan unit eselon I sampai dengan staf wajib melakukan upload.

Informasi yang dishare pada aplikasi harus memenuhi 5w1H, yaitu: *Who (tentang siapa), What (Apa yang terjadi), Where (dimana peristiwa terjadi), When (kapan peristiwa terjadi), Why (mengapa hal itu terjadi), dan How (bagaimana hal itu terjadi).*

Rincian capaian IKU 17 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 30. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021			TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan	84	100	119,05	86	98,15	114,13	90	98,15	109,06

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021			TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Yang Terstandar Lingkup Direktorat POA									

Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2021 realisasi capaian meningkat dan melampaui dari target yang ditetapkan, dengan hasil capaian kinerja untuk periode Triwulan III 2022 sebesar 98,15 persen dengan realisasi 114,13 persen. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat POA. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 90 persen, realisasi ini sesungguhnya telah melampaui target yaitu sebesar 98,15 persen.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 31. Tabel Capaian Nilai IKU MP Ditjen PSDKP Triwulan III 2022

No	Unit Kerja	TW I	TW II	TW III	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	97,08%	98,54%	74,48%	90,03%
2	Direktorat POA	100%	99%	98,15%	99,15%
3	Direktorat PPSDP	96,76%	99,84%	97,81%	98,14%
4	Direktorat PPSDK	98,06%	99,68%	97,41%	98,38%
5	Direktorat PP	96,44%	98,06%	98,38%	97,63%

18

PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT POA YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Rincian capaian IKU 18 Direktorat POA periode Triwulan III 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 32. Target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan III 2022

INDIKATOR KINERJA	TW III 2021			TW III 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	65	100	153,85	70	70	100	80	70	87.50

Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2021 realisasi capaian relatif sama yaitu tercapai 100%. Realisasi capaian indikator ini pada triwulan III 2022 dipenuhi sebanyak 70 persen dikarenakan berdasarkan manual IK dijelaskan bahwa untuk Satker yang tidak terdapat target Tindak Lanjut (TL) Rekomendasi hasil pengawasan, maka target dianggap tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen, realisasi ini baru mencapai 87.50 persen, oleh karena itu masih perlu upaya untuk dapat mencapainya sampai dengan akhir tahun 2024.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 33. Tabel Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	35	33	94,29	2	5,71
2	Direktorat POA	0	0	-	0	0
3	Direktorat PPSDK	5	5	100	0	0
4	Direktorat PPSDP	0	0	-	0	0
6	Direktorat PP	0	0	-	0	0

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan Triwulan III 2022 telah melaksanakan 10 Rincian Rutput (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2022. Pagu Direktorat POA yang semula sebesar Rp316.080.010.000 (tiga ratus enam belas miliar delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan penyesuaian anggaran anggaran Satker Dit. POA menjadi Rp332.477.900.000 (tiga ratus tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan III 2022 adalah sebesar **Rp 229,829,227,480** atau **69,13%** dari pagu **Rp 332,477,900,000**. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 lebih tinggi, realisasi Triwulan III 2021 sebesar **Rp. 144,409,428,055** hal ini dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Direktorat POA seperti melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan serta proses pembayaran pembangunan fisik Kapal Pengawas Kelas II.

Tabel 34. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 30 September 2022

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	100.000.000	264.000	0,26%	99.736.000	99,74%
Layanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	2.750.000.000	1.862.002.916	67,71%	887.997.084	32,29%
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang dipantau	750.000.000	438.878.165	58,52%	311.121.835	41,48%
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang di pantau	250.000.000	210.378.882	84,15%	39.621.118	15,85%
Operasi Kapal Pengawas	114.570.105.000	96.918.068.830	84,59%	17.652.036.170	15,41%
Operasi Pesawat Patroli	61.250.000.000	44.651.335.609	72,90%	16.598.664.391	27,10%
Kapal Pengawas	87.812.846.000	39.444.518.610	44,92%	48.368.327.390	55,08%
Speedboat Pengawas	8.978.070.000	8.919.157.564	99,34%	58.912.436	0,66%
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	51.016.879.000	34.150.010.330	66,94%	16.866.868.670	33,06%
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5.000.000.000	3.234.612.574	64,69%	1.765.387.426	35,31%
TOTAL	332.477.900.000	229.829.227.480	69,13%	102.648.672.520	30,87%

Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Triwulan II 2022

Dalam rangka melakukan rekomendasi pada dokumen Laporan Kinerja periode Triwulan II 2022, telah dilakukan beberapa tindaklanjut yaitu:

1. **Rekomendasi Tindak Lanjut 1:** Memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi pertama, Direktorat POA telah Melakukan rapat evaluasi bulanan serta melakukan Monev baik online maupun offline kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat POA. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat Hiu Macan, Direktorat POA Gedung Mina Bahari IV, lantai 12 Jakarta Pusat. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Konfirmasi capaian kinerja pada 7 indikator kinerja utama dan 2 indikator kinerja tambahan yang dilakukan pengukuran;
2. Pemeriksaan data dukung pada 9 indikator yang dilakukan pengukuran;
3. Konfirmasi Realisasi anggaran;
4. Pembahasan kendala dan tindaklanjut capaian kinerja



Gambar 3. *Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Triwulan III 2022*

2. **Rekomendasi Tindak Lanjut 2:** Melakukan upaya maksimal untuk memastikan tercapainya seluruh target Renstra Diten PSDKP 2020-2024.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi kedua, Direktorat POA telah Melakukan rapat khusus pada periode triwulan III 2022 untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan target Renstra PSDKP 2020-2024. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat Hiu Macan, Direktorat POA Gedung Mina Bahari IV, lantai 12 Jakarta Pusat. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Konfirmasi capaian kinerja pada 7 indikator utama dan 2 indikator tambahan yang dilakukan pengukuran;
2. Pemeriksaan data dukung pada 9 indikator yang dilakukan pengukuran;
3. Konfirmasi Realisasi anggaran;

4. Pembahasan kendala dan tindak lanjut capaian kinerja.



Gambar 4. *Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Triwulan III 2022*

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan III 2022

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan III 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Triwulan III 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU pada periode yang sama tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan,
2. Total IKU dan IK Direktorat POA tahun 2022 sebanyak 18 IKU, Target pencapaian untuk periode Triwulan III 2022 sebanyak 9 IK/IKU, Dari target 9 IKU/IK tersebut sebanyak 8 IKU/IK telah tercapai sesuai rencana dan 1 IKU/IK yang belum dicapai dikarenakan dengan adanya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan tidak tercapainya hari operasi pada kapal pengawas yang termasuk dalam variable perhitungan IKU tersebut. 9 IKU/IK lainnya akan dilakukan pengukuran capaian kinerja pada periode Triwulan IV Tahun 2022.
3. Dari 9 Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran pada periode Triwulan III 2022 Terdapat 3 indikator yang belum mencapai target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu antara lain: (1) Tingkat keaktifan dalam pembinaan Pokmaswas baru tercapai 91,50 persen target dari target 100 persen; (2) Tingkat Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas baru tercapai 95,66 persen dari target 100 persen; (3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan, baru tercapai 87.5 persen dari target 100 persen.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan beberapa kendala di atas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<p>a) Memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>b) Melakukan upaya maksimal untuk memastikan tercapainya seluruh target Renstra Diten PSDKP 2020-2024.</p>	<p>a) Melakukan rapat evaluasi bulanan serta melakukan Monev baik online maupun offline kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat POA.</p> <p>b) Melakukan rapat khusus pada periode triwulan IV 2022 untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan target Renstra PSDKP 2020-2024.</p>

